BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekadar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif, pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja, dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang andal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi (Ihyaul Ulum,2012:19).

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, pertama pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, kedua ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya pembuatan keputusan, ketiga ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121).

Output dari akuntansi adalah laporan keuangan baik untuk pihak eksternal maupun internal, laporan tersebut tentunya melalui sebuah proses yang tidak sederhana, untuk menjamin bahwa proses tersebut dimulai dari penyediaan *input* yang baik dan benar, proses pencatatan hingga pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sebuah sistem dan prosedur, sistem dan prosedur yang dimaksud dalam bidang akuntansi disebut dengan sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi, dalam konteks organisasi sektor publik atau pemerintahan, akuntansi yang ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna eksternal pemerintah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:24).

Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasakan sistem akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana, oleh karena itu, pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja (Wawan Sukmana, dkk,2009).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wawan Sukmana dan Lia Anggasari (2009), Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Mukmin, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2015) juga menyatakan

bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Harry Azhar Azis (2016) selaku Ketua BPK RI Pusat menyatakan Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi barang milik negara yang memadai serta persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,33 triliun belum dijelaskan status penyerahannya serta pencatatan, penyajian catatan dan fisik saldo anggaran lebih (SAL) tidak akurat.

Sudiarto (2017) selaku Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi menyatakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah memperoleh nilai 50,27 atau predikat "CC", penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran, dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintahan kota cimahi masih banyak memerlukan perbaikan.

Nono (2017) selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian Cimahi menambahkan, hal ini dikarenakan pelaporan keuangan, dokumen–dokumen perencanaan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (renstra) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, hal ini membuat kinerja Instansi menurun.

Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan akuntabilitas ini semakin meningkat karena tingginya tuntutan para *stakeholder* untuk mewujudkkan *good governance*, syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transaparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas (Rizal Djalil, 2014:409).

Pemerintah telah merancang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (Rizal Djalil, 2014:410).

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggung jawaban, pertama, pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah, kedua, pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:21).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lucy Auditya,dkk (2013), dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu, akuntabilitas tinggi pada pengelolaan keuangan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni

Putri (2015) juga menyatakan ada pengaruh antara penerapan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Arman Syifa (2016) selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar mengemukanan bahwa dalam penerapan SAP di lapangan masih ditemui adanya pengelolaan aset suatu daerah yang belum optimal dan belum ditelusuri keberadaanya serta catatan aset tetap tidak didukung data rincian ada pula tanah yang belum bersertifikat, juga realisasi belanja daerah yang belum didukung bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.

Nono (2017) selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian Cimahi menyatakan, ada beberapa Dinas SKPD pada saat merealisasikan belanja daerah belum didukung bukti pertanggung jawaban yang lengkap, sehingga instansi belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan dan teori terkait yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul "**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH"** dengan survei pada Dinas SKPD Kota Cimahi.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Juliandi, Irfan dan Saprinal (2014:102) :

> "Identifikasi masalah adalah relevan dengan latar belakang masalah, dengan kata lain identifikasi masalah berupa ringkasan inti-inti pokok dari indikasi atau gejala masalah yang ada".

Berdasarkan uraian latar belakang adapun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pelaporan keuangan belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Pada saat merealisasikan belanja daerah belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Juliandi, Irfan dan Saprinal (2014:104) :

"Rumusan Masalah adalah masalah yang telah dibatasi sebelumnya, perlu dirumuskan sebagai upaya memberikan arah, bahwa apa sebenarnya fokus yang hendak diteliti oleh peneliti".

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Menurut Happy Susanto (2010:39) :

"Maksud dalam penelitian yaitu hal-hal yang ingin dicapai".

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan data yang diperoleh guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:282) :

"Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan". Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:283) :

"Kegunaan Penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian".

1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut Sugiyono (2017:283) :

"Kegunaan praktis yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti".

Berdasarkan pengertian diatas maka kegunaan penelitian digunakan untuk memecahkan masalah pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) :

"Kegunaan akademis adalah untuk kepentingan pengembang keilmuan".

1. Bagi Penulis

   Bagi Peneliti yaitu dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi peneliti lainnya

   Kegunaan bagi peneliti lainnya yaitu menambah bahan referensi dan pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang sama mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja instansi pemerintahan.

3. Bagi Instansi

   Kegunaan bagi Instansi diharapkan dapat memberikan pandangan bagi instansi mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.